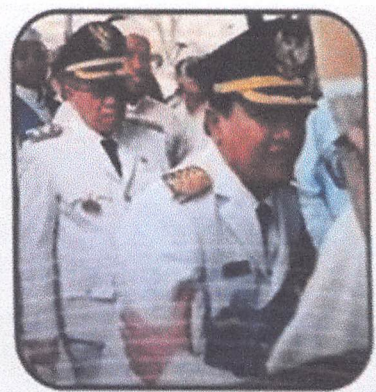




**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD)
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020**



I ♥
PAS



pasuruan
always fresh



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	vi
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Dasar Pemberntukan Daerah	1
2. Geografis Wilayah	2
3. Jumlah Penduduk	3
4. Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dan Pegawai	3
B. CAPAIAN KINERJA MAKRO	7
C. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR	9
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	8
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	36
D. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	46
1. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan	45
2. Pengukuran Capaian Kinerja	45
E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH	48
F. INOVASI DAERAH	50



DAFTAR TABEL

1.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	3
2.	Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan	4
3.	Perangkat Daerah dan Tipe Perangkat Daerah	5
4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
5.	Capaian Kinerja Makro	6
6.	Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan	45
7.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020	47



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas berkah, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.

Dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi gambaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penilaian kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah serta kami berharap dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional.

LPPD Tahun Anggaran 2020 adalah Penyampaian laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang merupakan salah satu kewajiban kepala daerah yang dilaksanakan satu kali dalam setahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2020. Semoga LPPD ini dapat memberikan keterangan yang cukup bagi Pemerintah Pusat dalam melakukan penilaian / evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pasuruan, Maret 2021

BUPATI PASURUAN

H.M. IRSYAD YUSUF, SE. MMA



A. GAMBARAN UMUM

1. Dasar Pembentukan Daerah

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di DJawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Menteri Dalam Negeri No. 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2023;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 130.03/161/HK/424.013/2021 tentang Tim Preview dan Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.

2. Geografis Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara geografis terletak antara 112°33'55" hingga 113°05'37" Bujur Timur dan antara 7°32'34" hingga 7°57'20" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.474,015 km². Perbatasan wilayah Kabupaten Pasuruan diantaranya :

- 1) Sebelah Utara, Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.
- 2) Sebelah Timur, Kabupaten Probolinggo.
- 3) Sebelah Selatan, Kabupaten Malang.
- 4) Sebelah Barat, Kabupaten Mojokerto.

Wilayah Kabupaten Pasuruan sendiri berada posisi yang sangat strategis dari segi ekonomi karena terletak pada delta jalur raya ekonomi yaitu :

- a. Jalur Surabaya-Jember, Banyuwangi, Bali
- b. Jalur Surabaya-Malang, dan
- c. Jalur Malang-Jember, Banyuwangi, Bali

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah perairan laut dan kawasan pantai membentang sepanjang $\pm$ 48 km dari timur ke barat dimulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil yang menghadap ke Laut Jawa dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi dan potensi laut lestari/ *Maximum Suistainable Yield* (MSY) sebesar $\pm$ 27.000 ton per tahun. Luas kawasan pesisir secara administratif (jarak arbiter 2 km dari garis pantai) sebesar 4.917 ha.



Adapun kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuartir muda (*young quarternary*) dan kuartir tua (*old quarternary*).

3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 dapat digambarkan melalui data sebagaimana berikut :

Tabel
Jumlah Penduduk Per Kecamatan

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Purwodadi	42.125	40.970	83.095
Tutur	33.383	31.594	64.977
Puspo	17.229	17.537	34.766
Lumbang	21.669	21.611	43.280
Pasrepan	31.521	31.073	62.594
Kejayan	39.694	39.540	79.234
Wonorejo	36.368	36.141	72.509
Purwosari	49.353	47.922	97.275
Sukorejo	54.149	52.639	106.788
Prigen	52.980	51.029	104.009
Pandaan	63.753	62.647	126.400
Gempol	73.294	70.912	144.206
Beji	49.767	48.479	98.246
Bangil	48.574	47.558	96.132
Rembang	39.690	40.295	79.985
Kraton	57.832	55.029	112.861
Pohjentrek	18.351	17.522	35.873
Gondangwetan	33.981	32.225	66.206
Winongan	26.984	26.339	53.323
Grati	50.357	49.163	99.520
Nguling	39.339	39.446	78.785
Lekok	49.695	48.487	98.487
Rejoso	27.347	26.394	53.741
Tosari	11.620	11.806	23.426
TOTAL	969.055	946.358	1.915.413

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasuruan, 2020

4. Jumlah Desa, Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah dan Pegawai

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Camat.

Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan berjumlah 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang terdiri dari :



TABEL
KECAMATAN DAN JUMLAH DESA/KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA
1.	BANGIL	11	4
2.	BEJI	2	12
3.	GEMPOL		15
4.	GONDANGWETAN	1	19
5.	GRATI	1	14
6.	KEJAYAN	1	24
7.	KRATON		25
8.	LEKOK		11
9.	LUMBANG		12
10.	NGULING		15
11.	PANDAAN	4	14
12.	PASREPAN		17
13.	POHJENTREK		9
14.	PRIGEN	3	11
15.	PURWODADI		13
16.	PURWOSARI	1	14
17.	PUSPO		7
18.	REJOSO		16
19.	REMBANG		17
20.	SUKOREJO		19
21.	TOSARI		8
22.	TUTUR		12
23.	WINONGAN		18
24.	WONOREJO		15

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan



Dengan memperhatikan kebijakan serta ketentuan yang sudah ditetapkan melalui Undang-undang yang berlaku, berikut Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan :

**TABEL
PERANGKAT DAERAH DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH	A
2.	SEKRETARIAT DEWAN	A
3.	INSPEKTORAT	A
DINAS		
1.	DINAS PENDIDIKAN	A
2.	DINAS KESEHATAN	A
3.	DINAS PU BINA MARGA	B
4.	DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG	B
5.	DINAS PERUMAHA DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	A
7.	DINAS SOSIAL	A
8.	DINAS TENAGA KERJA	A
9.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A
10.	DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PP	A
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	A
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	A
13.	DINAS PERHUBUNGAN	A
14.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	A
15.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	A
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PT	A
17.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	C
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	B
19.	DINAS PERIKANAN	B
20.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	A
21.	DINAS PERTANIAN	A
22.	DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN	A
23.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	A
BADAN		
1.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A
2.	BADAN KEUANGAN DAERAH	A
3.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	A
KECAMATAN		
1.	24 KECAMATAN	A

Sumber : Perda Kab. Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016

Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan didukung dengan jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan rincian sebagai berikut :



Tabel
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN
GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	I.a	0
2	I.b	4
3	I.c	19
4	I.d	81
5	II.a	130
6	II.b	281
7	II.c	719
8	II.d	698
9	III.a	965
10	III.b	1.842
11	III.c	1.095
12	III.d	1.138
13	IV.a	669
14	IV.b	1.635
15	IV.c	81
16	IV.d	2
17	IV.e	0
18.	HONORER DAERAH	623
TOTAL		9.982

Sumber : BKPPD Kab. Pasuruan, 2020

B. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 ditetapkan 6 indikator kinerja makro dengan capaian pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 sebagai berikut:

TABEL
CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	PERUBAHAN %
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,29	68,60	0,45 %
2	Angka Kemiskinan	8,68	9,26	6,68 %
3	Angka Pengangguran	5,42	6,24	15,13 %
4	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,8	-2,03	-135 %



5	Pendapatan Perkapita	90.920.000	88.900.000	-2,22%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,308	0,346	12,34%

Sumber dari BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 per 17 Maret 2021



C. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan.

No	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1.	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	551	DINAS PENDIDIKAN	
	2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	27.658	DINAS PENDIDIKAN	Hanya untuk peserta didik paud usia 5 s/d 6 tahun
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27.658	DINAS PENDIDIKAN	Hanya untuk peserta didik paud usia 5 s/d 6 tahun
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	4.058	DINAS PENDIDIKAN	Untuk semua jenjang usia PAUD
	5. Jumlah pendidik pada PAUD	1.472	DINAS PENDIDIKAN	
	6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.396	DINAS PENDIDIKAN	

		7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	810	DINAS PENDIDIKAN	
	2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
		1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	854	DINAS PENDIDIKAN	
		2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	121.727	DINAS PENDIDIKAN	
		3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	41.124	DINAS PENDIDIKAN	
		4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	121.727	DINAS PENDIDIKAN	
		5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.124	DINAS PENDIDIKAN	
		6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.010	DINAS PENDIDIKAN	
		7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	5.608	DINAS PENDIDIKAN	
		8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.229	DINAS PENDIDIKAN	
		9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.374	DINAS PENDIDIKAN	



10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.436	DINAS PENDIDIKAN	
11.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	953	DINAS PENDIDIKAN	
12.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	981	DINAS PENDIDIKAN	
13.	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	385	DINAS PENDIDIKAN	
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.948	DINAS PENDIDIKAN	
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.344	DINAS PENDIDIKAN	
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	661	DINAS PENDIDIKAN	
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan & pelatihan calon kepala sekolah	137	DINAS PENDIDIKAN	
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SD yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.030	DINAS PENDIDIKAN	
19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	649	DINAS PENDIDIKAN	

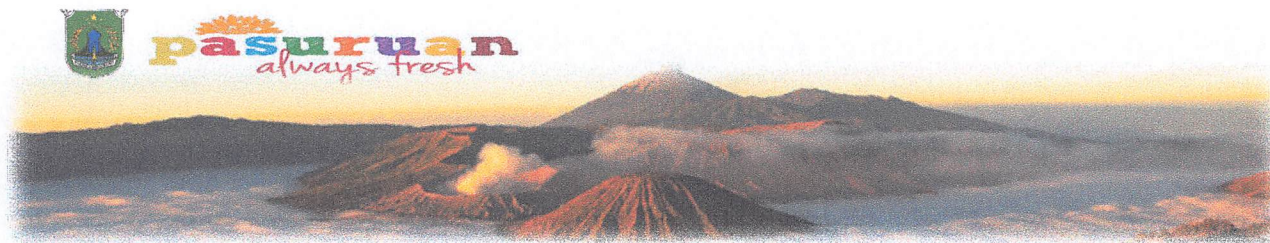


3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	854	DINAS PENDIDIKAN	
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	121.727	DINAS PENDIDIKAN	
	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	41.124	DINAS PENDIDIKAN	
	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	121.727	DINAS PENDIDIKAN	
	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	41.124	DINAS PENDIDIKAN	
	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	9.010	DINAS PENDIDIKAN	
	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	5.608	DINAS PENDIDIKAN	
	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	6.229	DINAS PENDIDIKAN	
	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2.374	DINAS PENDIDIKAN	
	10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.436	DINAS PENDIDIKAN	



		11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	953	DINAS PENDIDIKAN	
		12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	981	DINAS PENDIDIKAN	
		13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	385	DINAS PENDIDIKAN	
		14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	5.948	DINAS PENDIDIKAN	
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.344	DINAS PENDIDIKAN	
		16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	661	DINAS PENDIDIKAN	
		17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	137	DINAS PENDIDIKAN	
		18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.090	DINAS PENDIDIKAN	
		19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki	675	DINAS PENDIDIKAN	

		ijazah SMA/ sederajat			
	4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
		1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	2	DINAS PENDIDIKAN	
		2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	866	DINAS PENDIDIKAN	Hanya untuk usia 7 sampai 18 tahun
		3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	866	DINAS PENDIDIKAN	Hanya untuk usia 7 sampai 18 tahun
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	149	DINAS PENDIDIKAN	
		5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	17	DINAS PENDIDIKAN	
		6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	17	DINAS PENDIDIKAN	
		7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	7	DINAS PENDIDIKAN	
		8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	7	DINAS PENDIDIKAN	



b. Urusan Kesehatan.

No	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
2.	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk			
	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	8	DINAS KESEHATAN	
	2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	8	DINAS KESEHATAN	
	3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	76.533	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	463	DINAS KESEHATAN	
	4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	66.120	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standart	463	DINAS KESEHATAN	
	5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	75.447	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	463	DINAS KESEHATAN	
	6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			

		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	262.096	DINAS KESEHATAN	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	101.881	DINAS KESEHATAN	
	7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			Usia 7 – 15 th
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	15.316	DINAS KESEHATAN	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	101.881	DINAS KESEHATAN	
	8.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	65.385	DINAS KESEHATAN	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	33	DINAS KESEHATAN	
	9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50.000	DINAS KESEHATAN	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	165.975	DINAS KESEHATAN	
	10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.365	DINAS KESEHATAN	
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	68	DINAS KESEHATAN	



11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
12.	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	62.121	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	66	DINAS KESEHATAN	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	575	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	33	DINAS KESEHATAN	
	13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	213.027	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	165	DINAS KESEHATAN	
	14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	129.375	DINAS KESEHATAN	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	179	DINAS KESEHATAN	



c. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

No	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
3.	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			
	1 Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	10366,66 ha	DPKP	
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PU SDA & TR	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1128,88 ha	DPKP	
	4. Panjang pantai dikaw permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	DPKP	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan kab/kota	0	DINAS PU SDA & TR	
	6. Renc Teknis tata pengaturan air & tata pengairan/rencana pengelolaan SDA kewenangan kab/kota	0	DINAS PU SDA & TR	
	7. Data prasarana & sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	DINAS PU SDA & TR	
	2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota			

3.	1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	10366,66 ha	DPKP	
	2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PU SDA & TR	
	3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	1128,88 ha	DPKP	
	4.	Panjang pantai dikaw permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	-	DPKP	
	5.	Renc. Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan kab/kota	-	DINAS PU SDA & TR	
	6.	Renc Teknis tata pengaturan air & tata pengairan/rencana pengelolaan SDA kewenangan kab/kota	-	DINAS PU SDA & TR	
	7.	Data prasarana & sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	-	DINAS PU SDA & TR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
	1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik			
		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primier (m)}} \times 100\%$	68,12	DINAS PU SDA & TR	
	2.	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik			

		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}} \times 100 \%$	64,57	DINAS SDA & TR	
	3.	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik			
		$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (m)}} \times 100 \%$	66,2	DINAS SDA & TR	
	4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh			
	1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada	DINAS PERKIM	
	2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	-	DLH	
	3.	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM (Ada/Tidak)	Ada, 1	DINAS PERKIM	
	4.	Jumlah izin yg diberikan kepada BUMD untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	ADA	DINAS PERKIM	
	5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemda lain.	6	DINAS PERKIM	
	5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
	1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	1.557 KK	DINAS PERKIM	
	2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	271 KK	DINAS PERKIM	

3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat & data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S & SPALD T	1.828 KK	DINAS PERKIM	
4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-	DINAS PERKIM	
5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-	DINAS PERKIM	
6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1.828 KK	DINAS PERKIM	
7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		DINAS PERKIM	
	$\frac{\text{Jml rmh memiliki akses pengelolaan berupa cibluk/tangki septik}}{\text{Jml rmh diwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun}} \times 100\% \leq 25 \text{ jiwa/ha}$	-	DINAS PERKIM	
8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman			
	$\frac{\text{Jml rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\text{Jml rmh diwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wil terbangun}} \times 100\% \geq 25 \text{ jiwa/ha}$	-	DINAS PERKIM	
9.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman			
	$\frac{\text{Jml rumah yg memiliki sambungan rumah & air liembahnya diolah di IPALD}}{\text{Jml rmh diwilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$	14,82	DINAS PERKIM	
10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat			

		$\frac{\text{Jml rumah yang memiliki unit pengolahan septempat}}{\text{Jml rmh diwilayah yang termasuk dalam pengembangan SPALD S}} \times 100\%$	82,45	DINAS PERKIM	
		11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja			
		$\frac{\text{Jml sarana pengangkutan yang tersedia}}{\text{Jml sarana pengangkutan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	-	DINAS PERKIM	
		12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja			
		$\frac{\text{Jml kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\text{Jml kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan}} \times 100\%$	-	DINAS PERKIM	
		13. Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD			
		$\frac{\text{Jml rumah yg memiliki sambungan rumah yg trsembung dg IPAL D}}{\text{Jml rumah yang dlayanani dengan sambungan SPALD - S}} \times 100\%$	-	DINAS PERKIM	
		14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja			
		$\frac{\text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{Jml rumah yg termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	-	DINAS PERKIM	
	6.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi			
		$\frac{\text{Jml bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S}} \times 100\%$	100%	DPMPT	
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalatahun eksisting	593	DPMPT	
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	ada	DPMPT	Perda No 4 tahun 2017

		4. Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	ada	DPMPT	Keputusan bupati no 400/461/hk/424.014 /2020
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	DINAS PERKIM	
		6. Jumlah bangunan gedung yg ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	0	DINAS PERKIM	
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	7	DINAS PERKIM	
		8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yg dipelihara/ dirawat	2	DINAS PERKIM	
		7. Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota			
		1. Panjang jalan berdasarkan yg ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	2.315,89	DINAS PUBM	Kilometer
		2. Panjang jalan yang dibangun	0	DINAS PUBM	
		3. Panjang jembatan yang dibangun	4	DINAS PUBM	
		4. Panjang jalan yg ditingkatkan (struktur/fungsi)	37.764,04	DINAS PUBM	Meter
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	35,40	DINAS PUBM	Meter
		6. Panjang jalan yg direkonstruksi/direhabilitasi	59.904,55	DINAS PUBM	Meter
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	71,10	DINAS PUBM	Meter
		8. Panjang jalan yang dipelihara	81.155	DINAS PUBM	Meter
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	98,35	DINAS PUBM	Meter

	8.	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi			
	1.	Jumlah Pelatihan Tenaga Operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	DPKP	K3 Konstruksi/2019
	2.	Jumlah tenaga kerja Operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	DPKP	K3 Konstruksi/2019
	3.	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi Operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	7	DPKP	K3 Konstruksi/2019
	4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-		
	5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	-		
	6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-		
	7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-		
	8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	-		
	9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	-		

		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	-		
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	-		
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	-		
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	-		
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	-		
		15. Tersedianya data & informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yg menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		

		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	-		
		19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	-		
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yg terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	-		
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-		
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha & TDUP yang disetujui	-		
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yg menjadi kewenangan pengawasannya	-		
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	-		



d. Urusan Perumahan Rakyat.

No	IKK KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
4.	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	-		
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	180	DINAS PERKIM	
		3. Jumlah RT, KK dan korban jiwa yang rumahnya terkena bencana alam	-		
		4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	180	DINAS PERKIM	
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERKIM	
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERKIM	
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DINAS PERKIM	
	2.	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	-		
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DINAS PERKIM	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			

		1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERKIM	
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERKIM	
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERKIM	
		4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERKIM	
		5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERKIM	
		6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DINAS PERKIM	
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			
		1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	200,35 ha	DINAS PERKIM	
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	DINAS PERKIM	
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	41,69 ha	DINAS PERKIM	
	4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	875.925	DINAS PERKIM	

		2. Jumlah unit PK RTLH	2.413	DINAS PERKIM	
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	27.428	DINAS PERKIM	
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DINAS PERKIM	
		5. Rasio rumah dan KK	61,03%	DINAS PERKIM	
		6. Jumlah rumah pembangunan baru	0	DINAS PERKIM	
	5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	166	DINAS PERKIM	
		2. Jumlah unit rumah yg sudah difasilitasi air minum	17.798	DINAS PERKIM	
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1.798	DINAS PERKIM	
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/off site)	1.798	DINAS PERKIM	
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	DINAS PERKIM	
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	DINAS PERKIM	
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	DINAS PERKIM	
		8. Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	DINAS PERKIM	
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	DINAS PERKIM	



e. Urusan Ketentraman & Ketertiban Umum.

No	IKK KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
5.	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	44	SATPOL. PP	Kali pelanggaran dan pengaduan
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1794	SATPOL. PP	
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	192	SATPOL. PP	
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	7	SATPOL. PP	
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	SATPOL. PP	Perbup nomor 29 tahun 2016
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	52	SATPOL. PP	
	3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal			
		$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Satu Dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0	BPBD	
		2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yg memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		$\frac{\text{Jmlh pend di kawasan rawan bencana yg memperoleh info rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$	0,33%	BPBD	

4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal			
	$\frac{\text{Kemajuan dokumen yang disusun}}{\text{Kemajuan dokumen yang disusun dan disahkan}} \times 100 \%$	100%	BPBD	
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal			
	$\frac{\text{Kemajuan dokumen yang disusun}}{\text{Kemajuan dokumen yang disusun dan sudah disahkan}} \times 100 \%$	100%	BPBD	
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan			
	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara dikawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0,05%	BPBD	
	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan			
	$\frac{\text{jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{jumlah warga negara dikawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	0,05%	BPBD	
	5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana			
	$\frac{\text{jumlah warga negara yang medapat pusdalops}}{\text{jumlah warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	100%	BPBD	
	6. Persentase warga negara yg mendapat peralatan perlindungan			
	$\frac{\text{jumlah warga negara yang medapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{jumlah warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100 \%$	14,13%	BPBD	

5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB			
	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{jumlah seluruh penetapan KLB}} \times 100\%$	100%	BPBD	
	2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			
	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD	
	3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			
	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD	
	4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong & dievakuasi terhadap kejadian bencana			
	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil disari, ditolong dan dievakuasi}}{\text{Jumlah keseluruhan dari bencana}} \times 100\%$	100%	BPBD	
	6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	1. Jumlah & jenis layanan penyelamatan & evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Damkar di kabupaten/kota	63	SATPOL. PP	
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	SATPOL. PP	



		3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	SATPOL. PP	
		4. Pos Damkar yg dilengkapi dengan sarana / prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan & evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	SATPOL. PP	
		5. Jumlah & jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	43	SATPOL. PP	
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	SATPOL. PP	
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Damkar/PD yg menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	SATPOL. PP	
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	SATPOL. PP	



f. Urusan Sosial.

No	IKK KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
6.	1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar & gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)			
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.059	DINAS SOSIAL	
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	DINAS SOSIAL	
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3.264	DINAS SOSIAL	
	5. Jumlah kendaraan roda empat yg akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yg menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.178	DINAS SOSIAL	
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL	
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150	DINAS SOSIAL	
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar & gepeng yg memanfaatkan alat bantu	0	DINAS SOSIAL	



	10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	2	DINAS SOSIAL	
	11.	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	DINAS SOSIAL	
	12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINAS SOSIAL	
	13.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	
	14.	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2/24/24	DINAS SOSIAL	
	15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	150	DINAS SOSIAL	
	16.	Jumlah bimbingan sosial yg dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	DINAS SOSIAL	
	17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2	DINAS SOSIAL	
	18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	DINAS SOSIAL	
	19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	150	DINAS SOSIAL	

		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			
		20. terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak			
		21. terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	121	DINAS SOSIAL	
2.		Persen korban bencana alam & sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat & stlh tanggap darurat bencana daerah kab/kota			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	7500	DINAS SOSIAL	
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	DINAS SOSIAL	
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DINAS SOSIAL	
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	DINAS SOSIAL	
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	41.172	DINAS SOSIAL	
		6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	45	DINAS SOSIAL	



2. Indikator Kinerja Kunci Hasil Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1.	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD $\times 100\%$ Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	106,85%	DINAS PENDIDIKAN	Data jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar sebagian berasal dari luar Kabupaten Pasuruan
	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar $\times 100\%$ Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yg bersangkutan	85,52%	DINAS PENDIDIKAN	
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
	Jumlah anak usia 13-15 th yg sudah tamat/sedang belajar di sekolah menengah pertama $\times 100\%$ Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab yg bersangkutan	65,52 %	DINAS PENDIDIKAN	
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			

		Jumlah anak usia 7-18 th yg belum menyelesaikan PD & menengah yg sudah tamat/sedang belajar di PK $\times 100\%$ Jumlah anak usia 7-18 th yang belum menyelesaikan PK & menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	2,3 %	DINAS PENDIDIKAN	Penyebut menggunakan data anak usia 7-15 tahun, karena anak usia 16-18 ada sebagian masih bersekolah di SMA/SMK yang nota bene menjadi kewenangan Provinsi
--	--	--	-------	------------------	---

b. Urusan Kesehatan

NO	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
2.	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk			
	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah saki rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	6,69%	DINAS KESEHATAN	
	2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi			
	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	100%	DINAS KESEHATAN	
	3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil			
	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	93,54%	DINAS KESEHATAN	
	4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			
	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	98,60%	DINAS KESEHATAN	



5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yg dpt layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	98,25%	DINAS KESEHATAN	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	86,46%	DINAS KESEHATAN	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	99,94%	DINAS KESEHATAN	
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	77,72%	DINAS KESEHATAN	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	99,90%	DINAS KESEHATAN	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			

		$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	68,77%	DINAS KESEHATAN	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
		$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	92,81%	DINAS KESEHATAN	
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
		$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	101,17%	DINAS KESEHATAN	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
		$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	92,10%	DINAS KESEHATAN	
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
		$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	94,52%	DINAS KESEHATAN	



c. Urusan PUPR

No	IKK HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	Ket
3.	1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota			
		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}} \times 100 \%$	10,89%	DPKP	
	2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota			
		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (m)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$	100%	DPKP	
	3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota}} \times 100 \%$	72, 10%	DINAS SDA-TR	
	4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			

		Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendaatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendaatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah total proyeksi RT di seluruh Kab/Kota tersebut}} \times 100\%$	85,79%	DINAS SDA-TR	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota $\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	82,45%	DPKP	
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan $\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	100%	DPMPT	
7.	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap $\frac{\text{Jumlah panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	81,23%	BINA MARGA	
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	0%	DPKP	
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				



		$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	0%	DPKP	
--	--	---	----	-------------	--

d. Urusan Perumahan Rakyat

No	IKK Hasil		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
4.	1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota			
		$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yg akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100%	DPKP	
	2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
		$\frac{\text{RT Penerima Fasilitas Pengganti Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + RT Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total relokasi program pemda yg memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	0%	DPKP	
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani			
		$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 yg di tangani ha}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	21%	DPKP	
	4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
			3,13%	DPKP	



		$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$			
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
		$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	2,03%	DPKP	

e. Urusan Ketentraman

No	IKK HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
5.	1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		$\frac{\text{Jumlah pegaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	SATPOLPP	
	2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
		$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	16,15%	SATPOLPP	
	3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,86%	BPBD	
	4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,86%	BPBD	
	5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
	6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			

		Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah	100%	SATPOLPP	
		$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota}} \times 100\%$			
7.		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	95,24%	SATPOLPP	Min : 15 M / 7,5 Km Max : 30 M /15 Km

f. Urusan Sosial

NO	IKK HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
6.	1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			
	2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\times 100\%$	100%	DINAS SOSIAL	
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yg membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota			



D. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diuraikan sebagai berikut :

1. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

TABEL
TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1.1. Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73 – 6 %
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.2. Angka kemiskinan	9,35 %
3	Mewujudkan kerukunan, keamanan dan ketertiban umum.	2.1. Indeks Kesalehan Sosial	62,40
4	Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	3.1. Indeks Wiliamson	0,255
5	Mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	4.1. Indeks Reformasi Birokrasi	64,00
6	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.	5.1 IPM	68,90

2. Pengukuran Capaian Kinerja

- Pencapaian Kinerja Tujuan 1

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan Ekonomi	5,73 - 6	-2,03	-35.43

- Pencapaian Kinerja Tujuan 2

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	9,35	9,26	100,97

- Pencapaian Kinerja Tujuan 3

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
------------------	-------------------	-------------	----------------	-----------



Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan Sosial	62,40	76,6	122,76
---	-------------------------	-------	------	--------

- Pencapaian Kinerja Tujuan 4

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan	Indeks Wiliamson	0,255	0,277	91,37

- Pencapaian Kinerja Tujuan 5

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	64		

- Pencapaian Kinerja Tujuan 6

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	68,90	68,6	99,56



E. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, berikut merupakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Unaudited) berdasarkan Laporan Realisasi Tahun 2020 :

TABEL
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA.2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	PENDAPATAN	3.241.449.215.186,01	3.217.041.299.117,40	99,25
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	658.747.582.583,01	700.111.491.641,40	106,28
a.	Pendapatan Pajak Daerah	397.346.266.028,09	360.849.440.481,02	90,81
b.	Hasil Retribusi Daerah	30.048.065.217,92	34.236.693.406,00	113,94
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	101,50
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	226.698.491.332,00	300.300.638.658,38	132,47
2.	DANA PERIMBANGAN	1.793.065.079.336,00	1.755.653.880.426	97,91
a.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	289.249.810.251,00	271.830.390.452,00	93,98
b.	Dana Alokasi Umum	1.120.144.764.000,00	1.103.294.454.000,00	98,50
c.	Dana Alokasi Khusus	383.670.505.085,00	380.529.035.974	99,18
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	789.636.553.267,00	761.275.927.050,00	96,41
a.	Pendapatan Hibah	167.983.542.517,00	164.679.420.467,00	98,03
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	196.300.000.000,00	171.461.978.633,00	87,35
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	381.830.182.000,00	381.611.699.200,00	99,94
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	43.522.828.750,00	43.522.828.750,00	100,00

B.	BELANJA		3.540.643.197.884,28	3.238.383.232.383,24	91,46
	1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.071.180.797.846,57	1.974.235.435.742,00	95,32
		a. Belanja Pegawai	1.046.738.603.167,65	997.301.803.350,00	95,28
		b. Belanja Hibah	139.417.875.283,90	126.307.448.453,00	90,60
		c. Belanja Bantuan Sosial	39.022.375.000,00	34.784.875.000,00	89,14
		d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	43.406.157.391,02	43.341.894.789,00	99,85
		e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	611.101.017.004,00	600.400.751.456,00	98,25
		f. Belanja Tidak Terduga	191.494.770.000,00	172.098.662.694,00	89,87
	2.	BELANJA LANGSUNG	1.469.462.400.037,71	1.264.147.796.641,24	86,03
		a. Belanja Pegawai	218.975.553.331,37	205.840.410.542,00	94,00
		b. Belanja Barang dan Jasa	836.643.174.003,81	706.180.335.963,96	84,41
		c. Belanja Modal	413.843.672.702,53	352.127.050.135,28	85,09
C.	PEMBIAYAAN DAERAH				
	1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27	100,00
		a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.450.746.781,27	302.450.746.781,27	100,00
	1.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.256.764.083,00	0,00	0,00
		a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah	3.256.764.083,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi 2020 Kab. Pasuruan



F. INOVASI DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan rencana strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018–2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi program inovasi daerah antara lain :

1. Satrya Emas (Pusat strategi dan layanan ekonomi maslahat);
2. Pelasan (Pelatihan Santri);
3. Perwira Keluarga (Perempuan wirausaha berbasis keluarga);
4. Sakera Jempol (Program sadari kekerasan perempuan dan anak dengan jemput bola);
5. Pembentukan Koperasi;
6. Gerakan yuk nonggo (gerakan untuk belanja di tetangga dalam rangka untuk memaksimalkan dan meningkatkan sektor ekonomi desa dan masyarakat) ;
7. Wak Moqidin (Wayah kumpul bangun TPQ dan Madin);
8. Odha-link (Penanganan penderita HIV/Aids);
9. Surya Mas Jelita (Penurunan penderita kusta);
10. Agawe (Wayah gawe wc);
11. Kemisan (Koordinasi intensif pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan setiap hari kamis);
12. Pusaka (Pemuda dan santri anti narkoba);
13. Adus Kali Penelusuran sungai mulai hulu sampai hilir dalam rangka penanganan bencana banjir dan pencemaran lingkungan);
14. Pasuruan Gumuyu (Kabupaten Pasuruan yang guyup, rukun dan bersatu padu);
15. Rumahku Surgaku (Pembangunan berbasis keluarga);
16. P3D (Pemuda Pelopor Pembangunan Desa);
17. Pasuruan Podo Roso (Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Publik);
18. Kenduren Mas (Kendaraan urun rembug masyarakat).